



Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUKAPURA II
TELP./ FAKS (0265) 333156
WEBSITE : DINSOSPPKBP3A.TASIKMALAYAKAB.GO.ID
EMAIL : DINSOSPPKBP3A@TASIKMALAYAKAB.GO.ID
SINGAPARNA - 46415

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPKB P3A) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. LKIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, evaluasi kinerja, serta penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis dan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2025 serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kinerja Dinas pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan akuntabilitas Dinas Sosial PPKB P3A ke depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga LKIP ini dapat

memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta peningkatan kinerja pelayanan publik.

Singaparna, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL PPKB P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI, M.Si.

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19680507 199403 2 006

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR..... i
- DAFTAR ISI iii
- BAB I PENDAHULUAN 4
 - 1.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... 5
 - 1.1.1 Kedudukan 5
 - 1.1.2 Tugas dan Fungsi..... 5
 - 1.2. STRUKTUR ORGANISASI 7
- Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA..... 7
- 1.3. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA 7
 - 1.3.1.Aspek Kepegawaian 7
- Tabel 1.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2024 . 8
- Tabel 1.2 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun 2024..... 8
- Tabel 1.3 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2024 8
 - 1.3.2. Aspek Sarana Prasarana 9
- Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024..... 10
- 1.4. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)..... 13
- Tabel 1.5 Identifikasi Isu Strategis..... 13
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 15
- BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17
 - 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS..... 17
 - 2.1.1. Rencana Strategis Dinsos PPKB P3A Tahun 2021–2026 17
 - 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 18
- Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 18
- Tabel 2.2 Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 19
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 23
 - 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 23
- Tabel 3.1 Hasil Pencapaian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 24
- BAB IV PENUTUP 64
 - 4.1. Kesimpulan 64
 - 4.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 64
- LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2024 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA 72

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah selaku entitas akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja tahunan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya atas penggunaan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah selama kurun waktu tahun pelaporan.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat

menjadi sarana informasi publik serta sebagai sarana evaluasi internal Dinas.

1.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPKB P3A) Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.1.1 Kedudukan

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas dan Fungsi

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah khususnya pada Bagian Kesembilan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

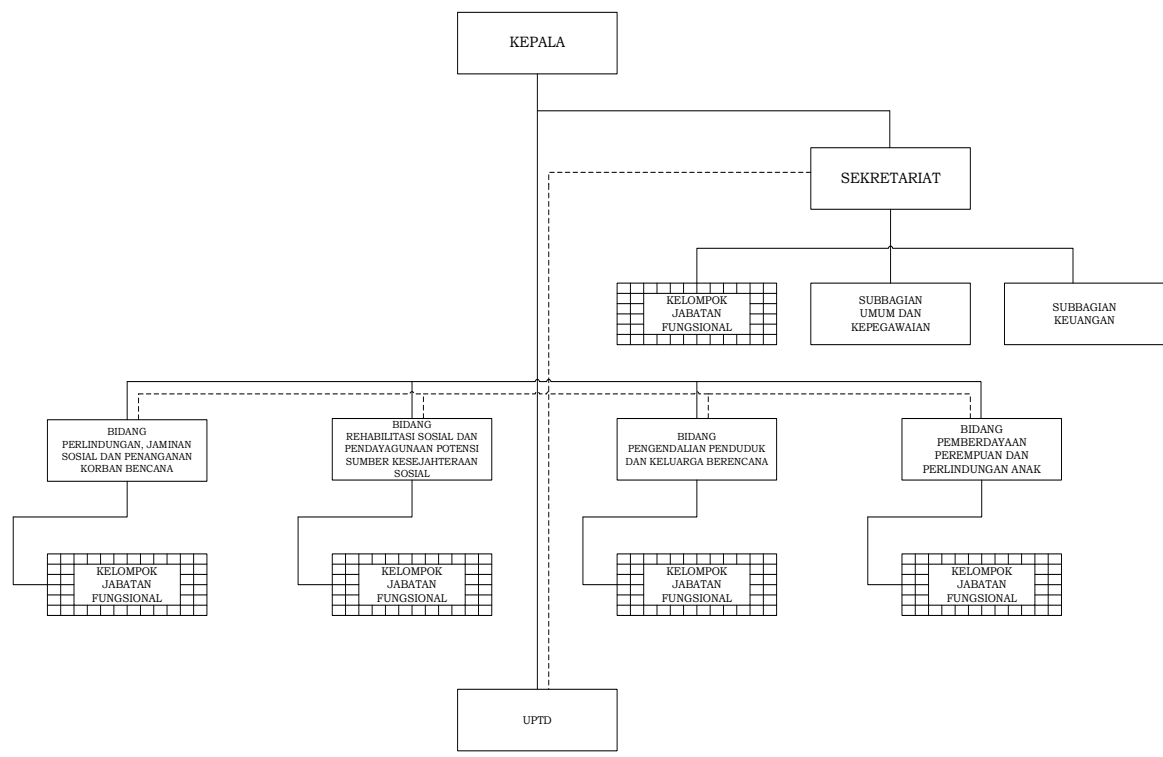
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PPKB, P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA



1.3. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1.3.1. Aspek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 21 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW)

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan serta berdasarkan pangkat dan golongannya disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin
pada Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Kepala Dinas	0	1	1
2	Sekretariat	12	9	21
3	Bidang Linjamsos	6	7	13
4	Bidang Rehabsos	4	5	9
5	Bidang PPKB	5	1	6
6	Bidang PPPA	2	5	7
7	UPTD PPA	3	1	4
TOTAL		32	29	61

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada
Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1		1						
2	Sekretariat	21		1	12				8	
3	Bidang Linjamsos	13		1	10	2				
4	Bidang Rehabsos	9		1	7	1				
5	Bidang PPKB	6		1	2				3	
6	Bidang PPPA	7		4	2	1				
7	UPTD PPA	4			4					
TOTAL		61	0	9	37	4	0	0	11	0

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan
Ruang pada Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG											PARUH WAKTU
			GOLONGAN IV			GOLONGAN III				GOLONGAN II			GOLONGAN IX	
			c	b	a	d	c	b	a	d	c	b		
1	Kepala Dinas	1	1											
2	Sekretariat	21		1		4	1	1	1	1				12
3	Bidang Linjamsos	13			1	1	2				1		2	3
4	Bidang Rehabsos	9			1	1		2	1				2	2

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG											PARUH WAKTU
			GOLONGAN IV			GOLONGAN III				GOLONGAN II			GOLONGAN IX	
			c	b	a	d	c	b	a	d	c	b		
5	Bidang PPKB	6				2	2		1		1			1
6	Bidang PPPA	7			1	1	2							2
7	UPTD PPA	4			1	1	1							1
TOTAL		61	1	1	5	10	9	3	2	0	2	1	4	21

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah.

1.3.2. Aspek Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sarana dan prasarana mobilitas dan operasional kantor sebagai penunjang kinerja aparatur yang secara umum dikelompokkan pada tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin utama, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana		Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah/ Volume	Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Ket (Digunakan Aktif / Tidak Aktif)
						B	KB	RB			
1.	Tanah										
	-	Tanah Kantor Dinas	Prasarana	1957 m2	m2	√			1999	Singaparna	Digunakan Aktif
	-	Tanah Shelter/UPT PPPA	Prasarana	400 m2	m2	√			1980	Manonjaya	Digunakan Aktif
	-	Tanah Negara Milik Adat C No. 2666, Persil No. 162 Milik Prov Desa Pakemitan Kec. Cikatomas	Prasarana	371 m2	m2	√			1988	Cikatomas	
2.	Gedung dan Bangunan										
	-	Gedung Kantor Dinas	Prasarana	1957 m2	m2	√			1999	Singaparna	Digunakan Aktif
	-	Gedung Shelter/UPT PPPA	Prasarana	60 m2	m2	√			1980	Manonjaya	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Manonjaya	Prasarana	300 m2	m2	√			2016	Manonjaya	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Taraju	Prasarana	300 m2	m2	√			2016	Taraju	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Cikatomas	Prasarana	300 m2	m2	√			2016	Cikatomas	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Manonjaya	Prasarana	300 m2	m2	√			2016	Manonjaya	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Karangnunggal	Prasarana	300 m2	m2	√			2016	Karangnunggal	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Singaparna	Prasarana	300 m2	m2	√			2018	Singaparna	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Ciawi	Prasarana	300 m2	m2	√			2018	Ciawi	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Pagerageung	Prasarana	300 m2	m2	√			2021	Pagerageung	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Bojongasih	Prasarana	300 m2	m2	√			2021	Bojongasih	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Cisayong	Prasarana	300 m2	m2	√			2023	Cisayong	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Pancatengah	Prasarana	300 m2	m2	√			2023	Pancatengah	Digunakan Aktif

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana		Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah/ Volume	Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Ket (Digunakan Aktif / Tidak Aktif)
						B	KB	RB			
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Culamega	Prasarana	300 m2	m2	√			2023	Culamega	Digunakan Aktif
	-	Gedung Balai Penyuluhan KB Kec. Sariwangi	Prasarana	300 m2	m2	√			2023	Sariwangi	Digunakan Aktif
3.	Peralatan dan Mesin Utama										
	-	Meja Kerja Eselon II	Sarana	1 unit	Unit	√				Ruang Kepala Dinas	Digunakan Aktif
	-	Kursi Kerja Eselon II	Sarana	1 unit	Unit	√				Ruang Sekretaris Dinas	Digunakan Aktif
	-	Kursi Kerja Eselon III	Sarana	4 unit	Unit	√				1 di Setiap Bidang	Digunakan Aktif
	-	Meja Biro	Sarana	24 unit	Unit					Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	Meja ½ Biro	Sarana	13 unit	Unit					Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	Meja Rapat	Sarana	8 unit	Unit					Ruang Rapat Kepala Dinas	Digunakan Aktif
	-	Lemari	Sarana	20 unit	Unit	√				Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	Filing Kabinet	Sarana	13 unit	Unit					Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	Kursi Putar	Sarana	41 unit	Unit					Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	Kursi Sice/Sofa	Sarana	3 unit	Unit					Ruang Kadis, Ruang Sekdis, Ruang Kabid PPKB	Digunakan Aktif
	-	Kursi Kayu	Sarana	4 unit	Unit			√		Halaman Depan Dinsos, PPKBP3A	Tidak Digunakan
	-	Kursi Rapat	Sarana	1 unit	Unit					Ruang Kepala Dinas	Digunakan Aktif
	-	Smart TV	Sarana	2 unit	Unit	√			2021	Ruang Kepala Dinas dan Ruang Sekdis	Digunakan Aktif
	-	TV	Sarana	9 unit	Unit					Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	AC	Sarana	12 unit	Unit					Unit Kerja	Digunakan Aktif
	-	Laptop / Note book	Sarana	44/16 unit	Unit	52		8		Unit Kerja	52 Unit Digunakan Aktif dan 8 Unit Tidak Digunakan karena kondisi Rusak Berat

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana		Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah/ Volume	Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Ket (Digunakan Aktif / Tidak Aktif)
						B	KB	RB			
	-	Komputer	Sarana	44 unit	Unit	35		9		Unit Kerja	35 Unit Digunakan Aktif dan 9 Unit Tidak Digunakan karena kondisi Rusak Berat
	-	Printer	Sarana	62 unit	Unit	44		18		Unit Kerja	44 Unit Digunakan Aktif dan 18 Unit Tidak Digunakan karena kondisi Rusak Berat
	-	Komputer Server	Sarana	2 unit	Unit			√		Unit Kerja	Tidak Digunakan
	-	Mesin Penghancur Kertas	Sarana	5 unit	Unit	1		4		Unit Kerja	1 Unit Digunakan Aktif dan 4 Unit Tidak Digunakan karena kondisi Rusak Berat
	-	Kendaraan Roda 6	Sarana	- unit	Unit					-	-
	-	Kendaraan Roda 4	Sarana	16 unit	Unit	15		1		-	15 Unit Digunakan Aktif dan 1 Unit Tidak Digunakan karena kondisi Rusak Berat dan sedang proses pengajuan penghapusan BMD
	-	Kendaraan Roda 3	Sarana	1 unit	Unit	√				-	Digunakan Aktif
	-	Kendaraan Roda 2	Sarana	101 unit	Unit	98		12		-	98 Unit Digunakan Aktif dan 12 Unit Tidak Digunakan karena kondisi Rusak Berat dan proses pengajuan penghapusan BMD
	-	Alat Kedokteran dan KB	Sarana	15 unit	Unit			√		Penyuluh Lapangan	-
4.	Jaringan dan Irigasi										
	-	Jaringan Internet	Sarana	1 unit	Unit	√				Ruang UP	Digunakan Aktif
5.	Aset Tetap Lainnya										
	-	Tenda Pengungsi	Sarana				√			Penyuluh Lapangan	Digunakan Aktif
	-	Dapur Umum Bencana	Sarana				√			Tagana	Digunakan Aktif

Sumber : Data Aset/Modal Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah.

1.4. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan urusan pembangunan yang diselenggarakan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 1.5
Identifikasi Isu Strategis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
I	Urusan Sosial		
1	Internasional Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya	Adanya upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pronangkis
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	
		Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial	
2	Nasional	Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat	Adanya pembenahan DTKS
			Adanya kuota tambahan penerimaan bantuan sosial bersyarat
		Penguatan dan pengembangan Puskesmas	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan di daerah dalam penguatan dan pengembangan Puskesmas
		Peningkatan Profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial	Bertambahnya jumlah relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
			memiliki sertifikasi keahlian
3	Daerah	Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar acuan penerima bantuan sosial pemerintah	Pemadanan DTKS dengan data NIK pada Disdukcapil serta verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara berkala
		Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat	Peningkatan koordinasi dan konsolidasi Tikor Kabupaten dan Tikor Kecamatan dalam monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat
		Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh	Pemenuhan SPM dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang tata cara pemenuhan SPM
		Peningkatan peran dan konsolidasi UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke pendidikan dan kesehatan dasar	Adanya sinergitas UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam verifikasi lapangan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
II	Urusan PPPA		
1	Internasional Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan terkait penyusunan kebijakan responsif gender
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Adanya penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Meningkatnya pemberdayaan kaukus politik bagi perempuan
2	Nasional	Peningkatan kualitas PUG dalam pembangunan	Meningkatnya capaian IPG dan IDG serta diraihnya anugerah APE
3	Daerah	Peningkatan skor capaian KLA	Adanya penguatan dan pengembangan Desa Layak Anak dan Forum Anak Daerah serta pelaksanaan Self Assesmen capaian KLA
		Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	Adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok PEKKA dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui P2WKAA
III	Urusan PPKB		
1	Internasional Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi
		Angka prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)semua cara pada Pasangan Usia	

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	
		Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	
		Unmeet Need KB (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	
2	Nasional	Peningkatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana	Meningkatnya jumlah daerah yang telah menyusun dokumen GDPK
			Penguatan dan pengembangan Kampung KB dan Rumah Dataku
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3	Daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan penurunan angka stunting	Meningkatnya akseptor KB
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui petugas lini lapangan

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- BAB I :

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya beserta penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsinya, permasalahan utama (strategic issue) serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja;
- BAB II :

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar perjanjian pada tahun pelaporan;

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya pada tahun pelaporan dengan analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan;

BAB IV : PENUTUP

Merupakan rangkuman dan kesimpulan umum atas capaian kinerja beserta permasalahan dan solusi;

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Rencana Strategis Dinsos PPKB P3A Tahun 2021–2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dari mulai strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan Iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya Dinas Sosial PPKB P3A secara umum di susun Rencana Strategis untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program program prioritas.

Tujuan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 3) Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A disusun dengan memperhatikan Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Selanjutnya, dari 7 (Tujuh) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2021-2026. Tujuh indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kabupaten yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Perubahan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	81,65 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan glandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,25 %
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,37 Poin
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	69,65 %
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	71,50 Poin

Setelah mengalami perubahan sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 12 (Dua Belas) program dengan total anggaran sebesar **Rp. 42.020.418.649** (Empat puluh dua milyar dua puluh juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah). Rincian program dan besaran anggaran per program tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial PPKB P3A
Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.769.143.579	
2	Program Pemberdayaan Sosial	708.000.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.928.410.980	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.074.383.628	
5	Program Penanganan Bencana	1.735.858.600	
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	486.266.700	
7	Program Perlindungan Perempuan	531.637.800	
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	449.869.500	
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	894.395.900	

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
10	Program Pengendalian Penduduk	205.736.000	
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.148.584.900	
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	10.088.131.062	
	Jumlah	42.020.418.649	

Besaran anggaran per urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sosial;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial sebesar Rp. 19.215.796.787,00 (Sembilan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 29,62% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut :

 - a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah);
 - b. Program Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.928.410.980,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.074.383.628,00 (Tujuh milyar Tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - d. Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.735.858.600,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
2. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebesar Rp. 20.442.451.962,00 (Dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau dengan persentase sebesar 48,65% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut :

 - a. Program Pengendalian Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.736.000,00 (Dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.148.584.900,00 (Sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah); dan
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.088.131.062,00 (Sepuluh milyar delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu enam puluh dua rupiah).

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar Rp. 2.362.169.900,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) atau dengan persentase sebesar 5,62% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 4 (empat) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.266.700,00 (Empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- b. Program Perlindungan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 531.637.800,00 (Lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.869.500,00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 894.395.900,00 (Delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

4. Urusan Penunjang;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan penunjang adalah sebesar Rp. 6.769.143.579,00 (Enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau dengan persentase sebesar 16,11%, yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.769.143.579,00 (Enam milyar tujuh ratus enam puluh

sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)).

Selanjutnya Perjanjian Kinerja diikuti oleh seluruh pejabat struktural Eselon III dan IV hingga pelaksana secara berjenjang dan secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Tabel 3.1
Hasil Pencapaian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian IKU 2025	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	67,4	92,56	137,33	Perubahan data DTKS menjadi DTSEN membuat perubahan data penerima bantuan sosial yang signifikan. Banyak masyarakat yang semula terdaftar dalam DTKS menjadi tidak masuk dalam kategori Desil 1-5 DTSEN. Sehingga penerima bantuan sosial menjadi disesuaikan dengan data yang terbaru	Data penerima bansos sebelum ditetapkan dilakukan pemadanan terlebih dahulu kepada DTSEN sehingga data calon penerima seluruhnya adalah Desil 1-5 dalam DTSEN dan akurat
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100,00	1. Gudang penyimpanan terlalu kecil sehingga barang di tumpuk dengan pelayanan tanggap darurat; 2. Minimnya jumlah paket sandang untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial; 3. Minimnya anggaran untuk penanggulangan bencana sehingga tidak bisa maksimal	1. Menjalankan program penanganan korban bencana yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan makanan dan sandang; 2. Meningkatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana sehingga Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; 3. memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai tanggap darurat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian IKU 2025	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat.	bencana; 4. Pengajuan Anggaran melalui TAPD serta kebutuhan yang di butuhkan oleh korban bencana ketika paska bencana, maupaun belum terealisasi di tahun sebelumnya; 5. Merealisasikan pengajuan kebutuhan yang Optimal
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100,00	1. Data PPKS yang menjadi sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar baru permakanan dan alat bantu saja; 3. SDM untuk pemenuhan kebutuhan dasar belum maksimal; 4. Desa belum maksimal menginput Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk PPKS yang menjadi SPM	1. Pengambilan data SPM dari DTKS untuk pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan tanpa anggaran meskipun tidak maksimal; 3. Pemberdayaan Pendamping Sosial; 4. Pemberdayaan Pendamping Sosial untuk koordinasi dengan Operator Desa.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian IKU 2025	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	4,25	4,25	100,00	1. Kurangnya SDM untuk menangani PPKS; 2. Tidak berfungsinya shelter dikarenakan Lokasi yang terlalu jauh (Lokasi Shelter di Manonjaya); 3. Tidak adanya anggaran untuk penanganan PPKS diluar SPM.	1. Pemberdayaan Pendamping Sosial; 2. PPKS terlantar langsung di rujuk tanpa dimasukan ke shelter; 3. Pelaksanaan kegiatan terbatas.
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,37	*60,82	94,49	1. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen;2. Masih rendahnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dalam pengambilan keputusan;3. Sumbangan pendapatan perempuan masih rendah.	1. Meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan;2. Meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan;3. Menargetkan keterwakilan 30 % perempuan di parlemen.
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	%	72,25	66,60	92,18	Para PUS yang ingin ber-KB dan yang telah ber-KB tidak seluruhnya terlaporkan dalam sistem pendataan, terutama yang pemasangan mandiri.	Sosialisasi pendataan kepada TPK dan Bidan yang ada di Fasyankes untuk berupaya lebih dalam melaporkan pemasangan KB. Pelaksanaan gebyar pelayanan KB pada hari-hari besar kesehatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian IKU 2025	Hambatan	Upaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	66	81,07	122,83	Terdapat beberapa instrument penilaian yang tidak dapat dipenuhi karena beberapa keterbatasan. Seperti Instrumen penilaian Zona Integritas, Budaya BerAkhlak, dan SPBE. Hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya penerapan instrumen penilaian tersebut.	Memaksimalkan potensi penilaian dalam instrumen lain yang bisa memperoleh nilai maksimal. Sehingga dapat mendongkrak penilaian akhir dari seluruh instrumen

**Realisasi Tahun Sebelumnya*

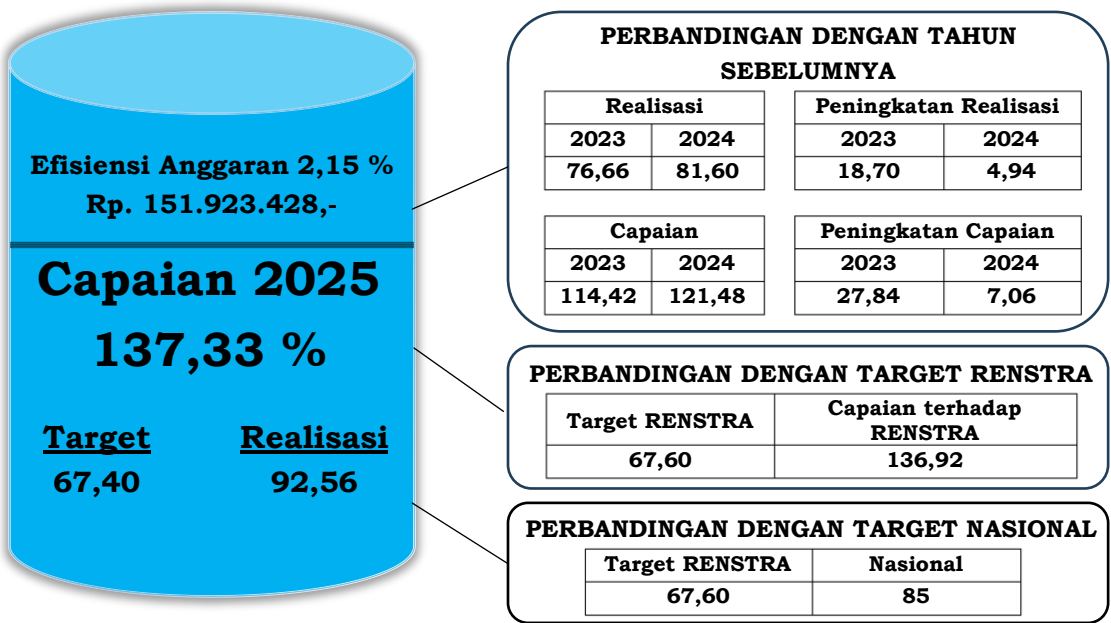
Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, sebagian telah dapat menyamai target kinerja dengan persentase sebesar 42,86%, yang melampaui target sebesar 28,57%, yang mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 28,57%.

Uraian terhadap pengukuran kinerja capaian sasaran urusan sosial, urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin**
- Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial**

Masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, penyandang disabilitas terlantar di luar panti, gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti.

Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2025 capaian kinerja nya adalah sebesar 137,33%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 81,60% terdapat kenaikan 10,96% pada tahun 2025 menjadi 92,56%. Angka ini telah melebihi target pada tahun 2025 yaitu 67,40%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya melebihi target yang direncanakan.

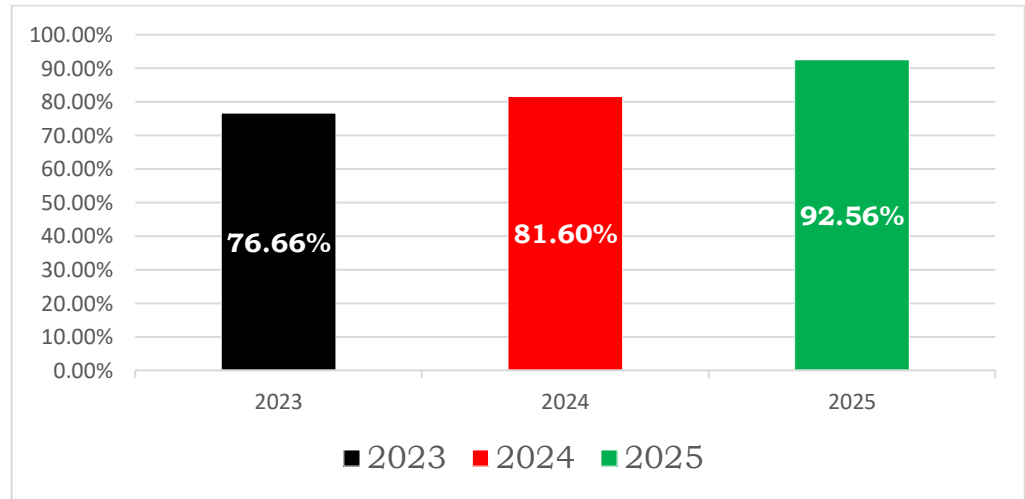


Pada Aspek Realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan 10,96% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 81,60% meningkat pada tahun 2025 sebesar 92,56%. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan 15,85% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 121,48% menjadi 137,33% pada tahun 2025.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Capaian sebesar 137,33% menunjukkan kinerja sangat optimal karena realisasi (92,56) jauh melampaui target (67,4). Hal ini mengindikasikan efektivitas proses pendataan, validasi, serta percepatan penyaluran bantuan sosial sehingga cakupan penerima manfaat meningkat signifikan. Keberhasilan ini juga mencerminkan responsivitas perangkat daerah dalam memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 92,56% dari target Renstra sebesar 67,60%. Capaian tahun 2025 telah melampaui target sebesar 24,96%. sehingga capaian realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial telah melampaui capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami Peningkatan di tahun 2023 realisasi sebesar 76,66%, tahun 2024 mencapai 81,60% dan pada tahun 2025 sebesar 92,56%. Hal ini merupakan wujud peningkatan perhatian dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Tren Peningkatan realisasi Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah PPKS yang memperoleh sosial pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \right) \times 100$$
$$\left(\frac{783.469 \text{ orang}}{846.400 \text{ orang}} \right) \times 100 = 92,56\%$$

Rincian target, capaian kinerja dan persentase capaian kinerja untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
fakir miskin	Orang	846.400	783.469	92,56
Jumlah		846.400	783.469	92,56

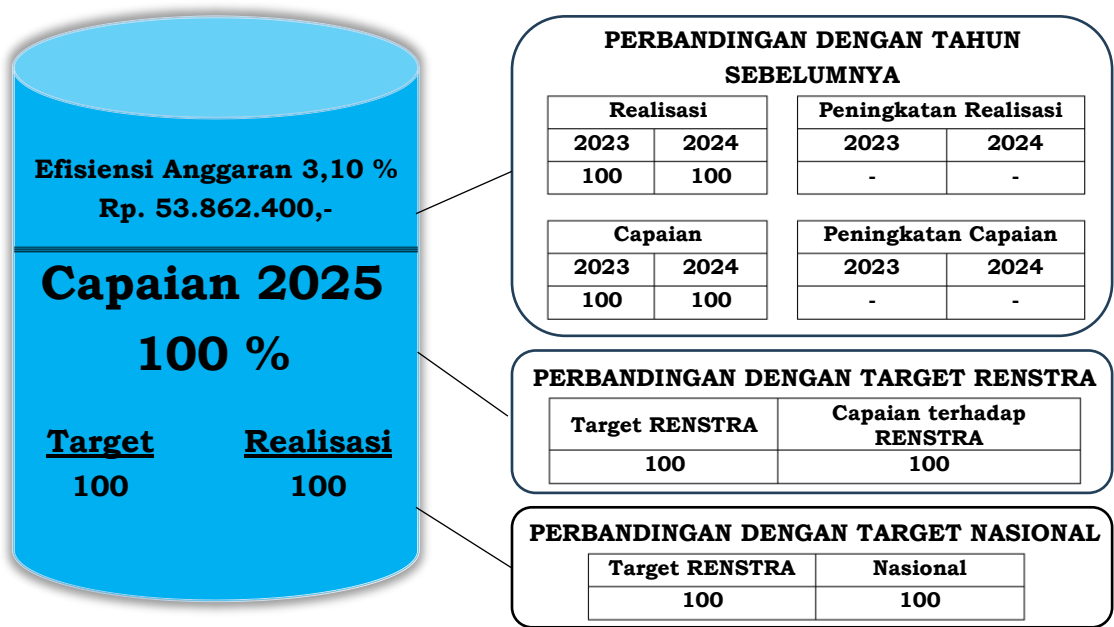
Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 2,15% atau setara dengan Rp. 151.923.428,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.074.383.628,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.922.460.200,-

2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota
----	--	--

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 capaian kinerja nya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu 100% dapat menyamai pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka ini dapat mencapai target pada tahun 2025 yaitu 100%, Capaian kinerja dari

indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya dapat mencapai target yang direncanakan.

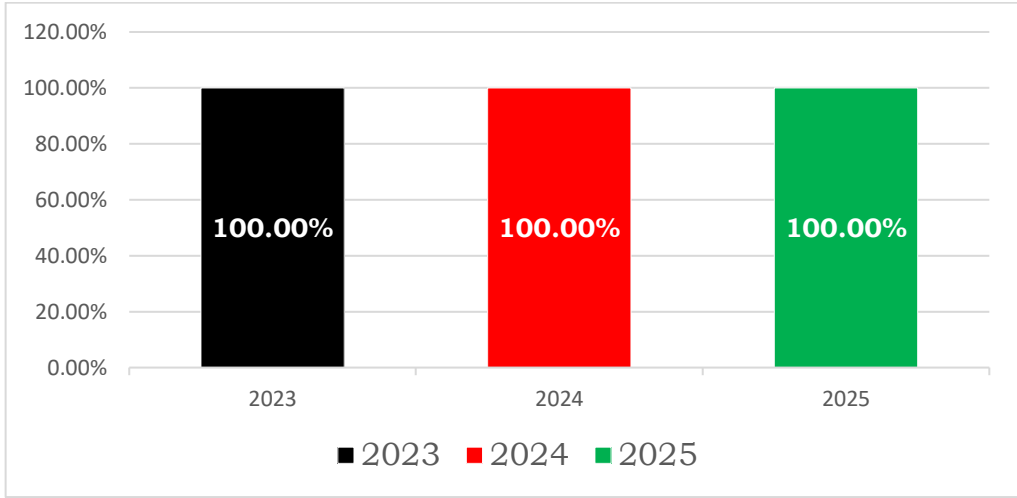


Pada Aspek Realisasi dan aspek kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota dapat menyamai dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 100%, pada tahun 2025 sebesar 100%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Capaian 100% menunjukkan seluruh target pelayanan terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini menandakan kesiapsiagaan daerah dalam penanganan tanggap darurat serta koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif. Meskipun tidak melampaui target, keberhasilan mempertahankan angka 100% mencerminkan stabilitas sistem perlindungan sosial pada situasi krisis

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100%. Capaian tahun 2025 dapat mencapai target. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 sampai dengan 2025 dapat mencapai target yaitu sebesar 100%. Tercapainya target kinerja pada tahun 2025 dikarenakan telah terpenuhinya penyediaan paket bantuan bagi korban bencana sesuai dengan estimasi kebutuhan yang telah diperhitungkan.

Tren Peningkatan realisasi Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{5.075 \text{ jiwa}}{5.075 \text{ jiwa}} \right) \times 100 = 100,00\%$$

Berdasarkan Berita Acara/Laporan Kejadian Bencana yang disampaikan oleh Kecamatan beserta unsur Muspika Kecamatan, jumlah laporan kejadian bencana pada tahun 2025 sebanyak 115 kejadian bencana alam dan bencana sosial, dengan total jumlah korban sebanyak 1.730 KK/5.075 jiwa yang seluruhnya telah menerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan sebagai berikut:

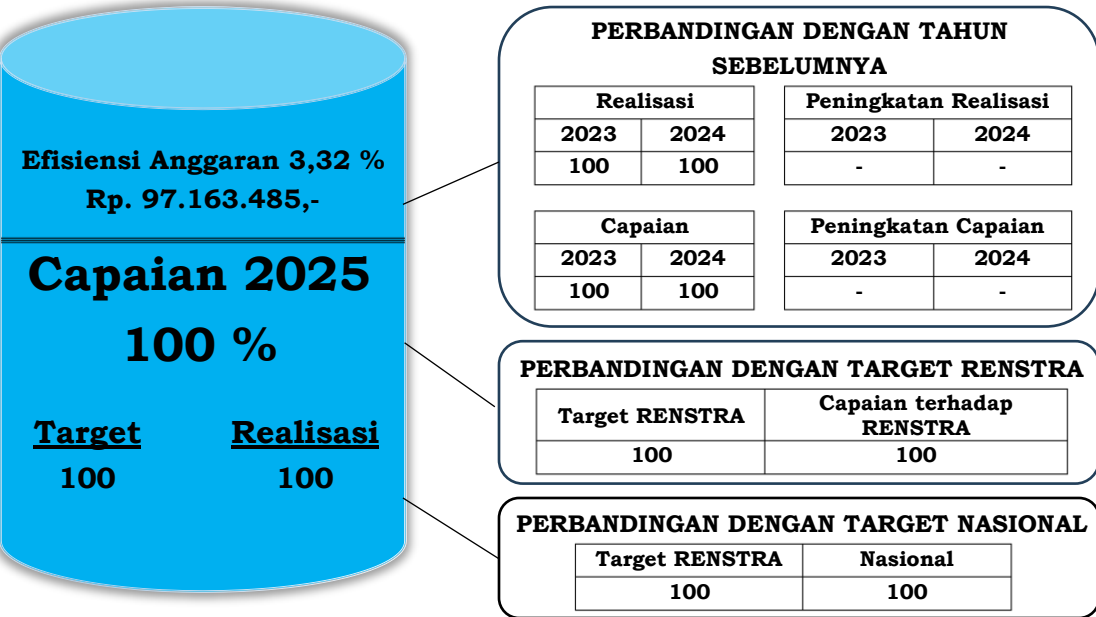
- 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; dan
- 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Penanganan Bencana. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 3,10% atau setara dengan Rp. 53.862.400,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.735.858.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.681.996.200,-.

3.

Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti
- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2025 capaian kinerja nya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 100% dapat menyamai pada tahun 2025 sebesar 100%. Angka ini dapat mencapai target pada tahun 2025 yaitu 100%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya dapat mencapai target yang direncanakan.

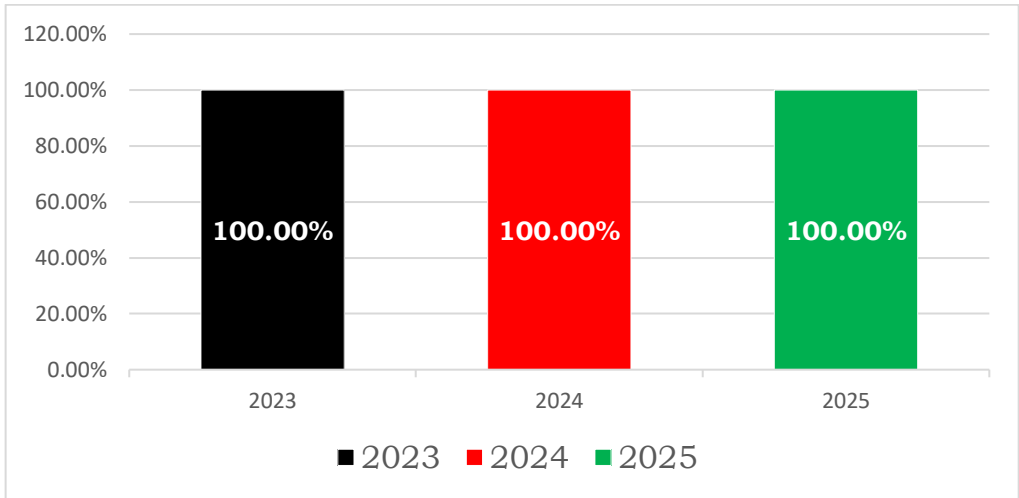


Pada Aspek Realisasi dan aspek kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dapat menyamai dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 100%, pada tahun 2025 sebesar 100%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Realisasi 100% menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan di luar panti. Pelayanan telah menjangkau seluruh sasaran sesuai target yang direncanakan, menandakan efektivitas mekanisme identifikasi dan intervensi sosia

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100%. Capaian tahun 2025 dapat mencapai target. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2023 sampai dengan 2025 dapat mencapai target yaitu sebesar 100%.

Tren Peningkatan realisasi Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu) tahun}}{\text{jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{7.977 \text{ jiwa}}{7.977 \text{ jiwa}}\right) \times 100 = 100\%$$

Rincian target, capaian kinerja dan persentase capaian kinerja untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Lansia	Orang	4.654	4.654	100
anak	Orang	1.820	1.820	100
Disabilitas	Orang	1.403	1.403	100
Gepeng	Orang	100	100	100
Jumlah		7.977	7.977	100

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Rehabilitasi Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 3,32% atau setara dengan Rp. 97.163.485,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.928.410.980,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.831.247.495,-.

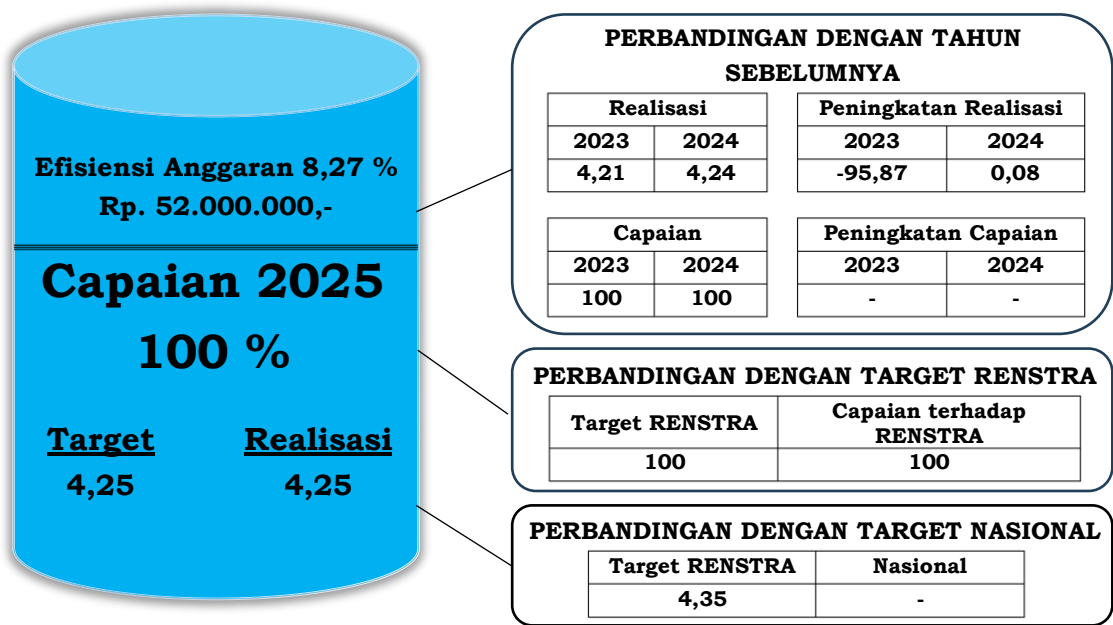
4. Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS

Persentase PPKS yang tertangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud disini merupakan kelompok PPKS diluar fakir miskin, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana yang telah diuraikan dalam indikator kinerja sebelumnya. Persentasi PPKS yang tertangani pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan dan menyamai capaian pada tahun 2024.

Persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2025 capaian kinerja nya adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 4,24% terdapat kenaikan 0,01% pada tahun 2025

menjadi 4,25%. Angka ini telah mencapai target pada tahun 2025 yaitu 4,25%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya mencapai target yang direncanakan.

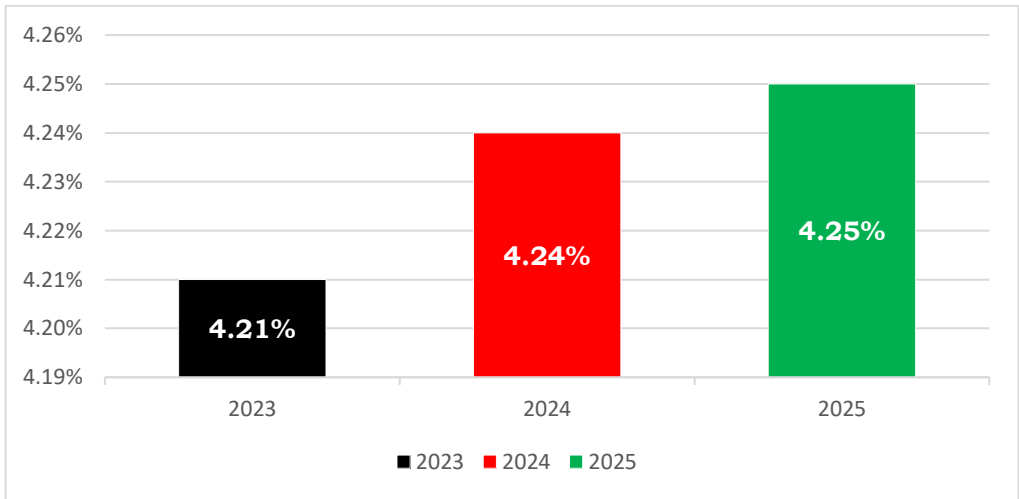


Pada Aspek Realisasi Persentase PPKS yang tertangani mengalami peningkatan 0,01% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 4,24% meningkat pada tahun 2025 sebesar 4,25%. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2025 ini sama dengan dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% dan pada tahun 2025 pun sebesar 100%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Capaian 100% mencerminkan optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan intervensi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini menunjukkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya cukup memadai dalam menangani kasus yang terdata.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 4,25% dari target Renstra sebesar 4,35%. Capaian tahun 2025 belum mencapai target. capaian realisasi Persentase PPKS yang tertangani kurang 0,10% dari Target Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Persentase PPKS yang tertangani tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami Peningkatan di tahun 2023 realisasi sebesar 4,21%, tahun 2024 mencapai 4,24% dan pada tahun 2025 sebesar 4,25%.

Tren Peningkatan realisasi Persentase PPKS yang tertangani



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah PPKS lainnya yang tertangani}}{\text{jumlah PPKS yang memerlukan penanganan dalam 1 tahun}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{114 \text{ kasus}}{114 \text{ kasus}} \right) \times 100 = 100\%$$

Kasus-kasus PPKS tersebut telah dapat ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan didukung oleh tenaga relawan dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penggerak Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti Sosial dan relawan sosial lainnya.

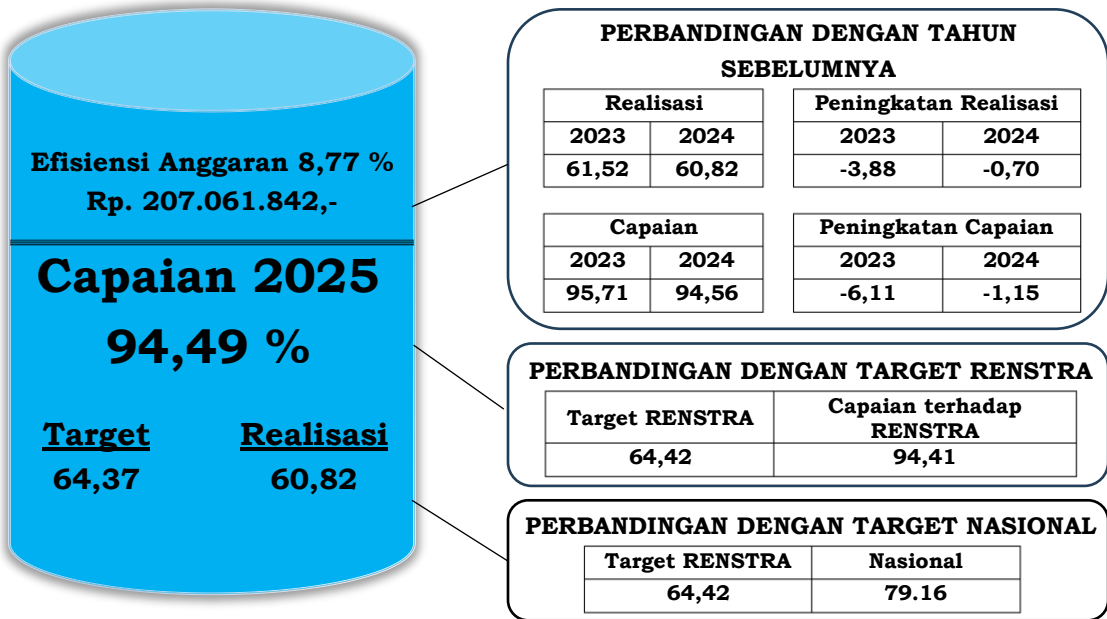
Persentase PPKS yang tertangani bertujuan untuk Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial. Faktor keberhasilan tercapainya target Persentase PPKS yang tertangani melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Pemberdayaan Sosial. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 8,27% atau setara dengan Rp. 52.000.000,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 708.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 649.481.000,-.

5. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2024 sementara capaian kinerja nya adalah sebesar 95,65%. Karena realisasi tahun 2024 belum keluar nilainya dari BPS Pusat, jadi Dinsos PPKB P3A menggunakan realisasi tahun 2023 sebesar 61,52%. Angka ini belum bisa mencapai target pada tahun 2024 sebesar 64,32%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya belum bisa mencapai target yang direncanakan.

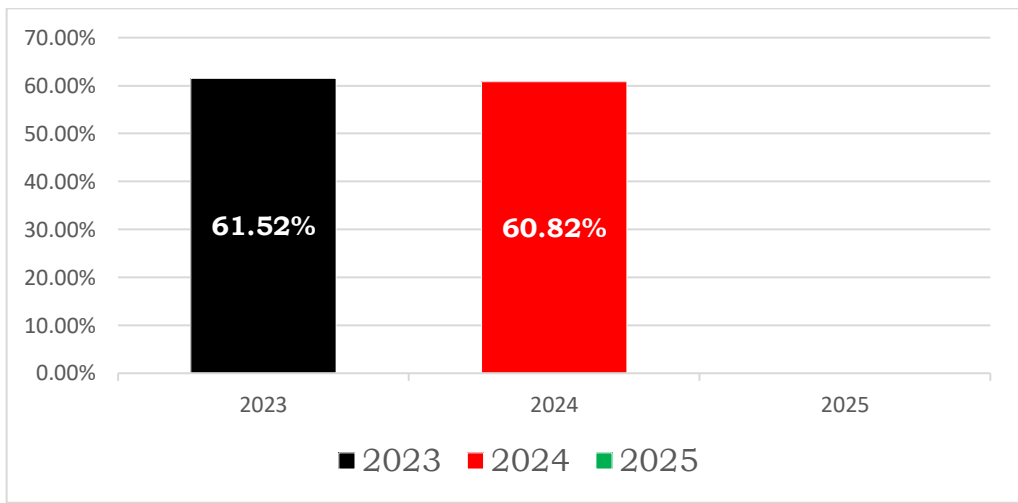


Pada Aspek Realisasi Indek Pemberdayaan Gender (IDG) belum diketahui apakah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena nilai belum keluar dari BPS Pusat. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 0,07% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 94,56% menjadi 94,49% pada tahun 2025.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Capaian 94,49% menunjukkan target belum sepenuhnya tercapai karena realisasi (60,82) masih di bawah target (64,37). Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam aspek ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan belum optimal. IDG sangat dipengaruhi faktor struktural lintas sektor sehingga memerlukan kolaborasi yang lebih luas, penguatan program afirmatif, serta peningkatan advokasi kesetaraan gender secara berkelanjutan.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 60,82% dari target Renstra sebesar 64,42%. Capaian tahun 2024 belum bisa mencapai target. sehingga capaian realisasi Indek Pemberdayaan Gender (IDG) belum bisa mencapai capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami Penurunan di tahun 2023 realisasi sebesar 61,52%, tahun 2024 mencapai 60,82% tetapi pada tahun 2025 belum ada.

Tren Peningkatan realisasi Indek Pemberdayaan Gender (IDG)



Indek Pemberdayaan Gender (IDG) bertujuan untuk Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Faktor keberhasilan tercapainya target Indek Pemberdayaan Gender (IDG) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu:
1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Program Perlindungan Perempuan;
 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

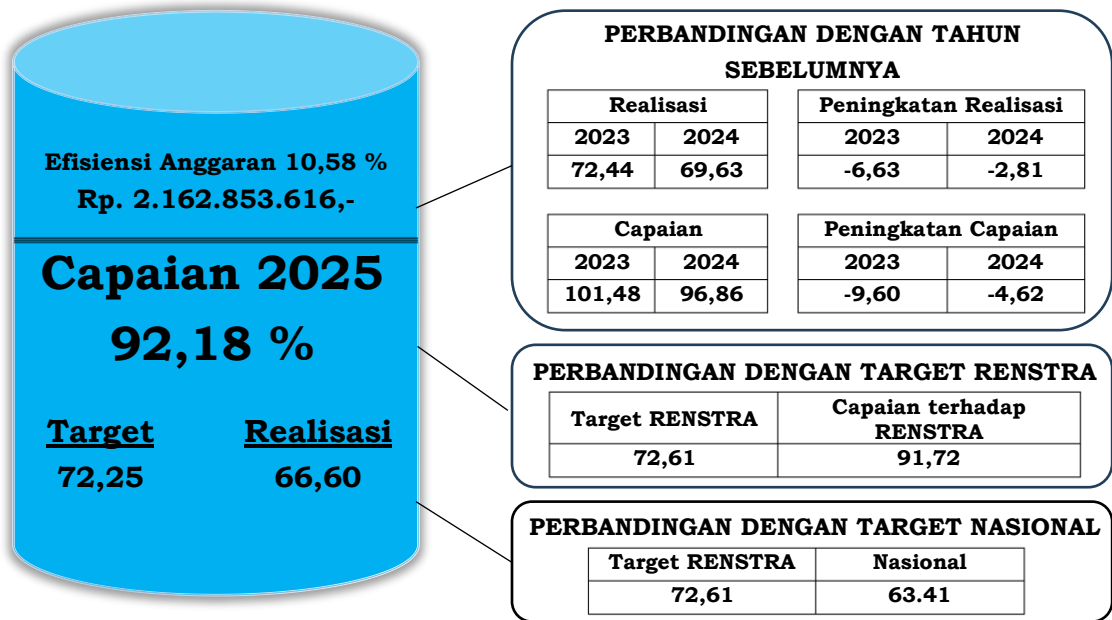
Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 8,77% atau setara dengan Rp. 207.061.842,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.362.169.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.155.108.058,-.

6.

Meningkatnya Kepesertaan KB

Rasio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB pada tahun 2025 capaian kinerja nya adalah sebesar 92,18%. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 69,63% terdapat Penurunan 3.03% pada tahun 2025 menjadi 66,60%. Angka ini tidak mencapai target pada tahun 2025 yaitu 72,25%, Capaian kinerja dari indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang diukur, capaian kinerjanya tidak mencapai target yang direncanakan.



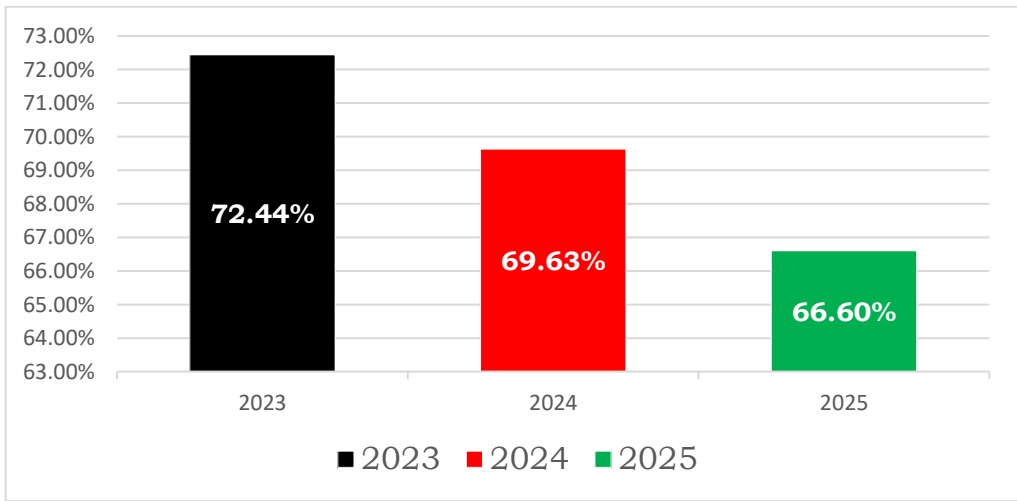
Pada Aspek Realisasi Rasio Akseptor KB mengalami Penurunan 3,03% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 69,63% menurun pada tahun 2025 sebesar 66,60%. Serta pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2025 ini mengalami Penurunan 4,68% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 96,86% menjadi 92,18% pada tahun 2025.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Dengan capaian 92,18%, indikator ini menjadi yang terendah di antara tujuh indikator. Realisasi 66,6 belum memenuhi target 72,25, yang mengindikasikan adanya penurunan minat atau akses terhadap layanan KB. Faktor sosial budaya, persepsi terhadap kontrasepsi, serta keterbatasan intensitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) menjadi penyebab. Tidak seluruh Fasyankes yang melayani KB melaporkan layanannya dalam sistem pendataan menjadi penyebab lainnya. Diperlukan strategi intensifikasi pelayanan KB, penguatan peran penyuluh, serta pendekatan berbasis keluarga untuk meningkatkan kepesertaan.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 66,60% dari target Renstra sebesar 72,61%. Capaian tahun 2025 tidak bisa mencapai target. sehingga capaian realisasi Rasio Akseptor KB tidak bisa mencapai capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Rasio Akseptor KB tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami Penurunan di tahun 2023 realisasi sebesar 72,44%, tahun 2024 mencapai 69,63% dan pada tahun 2025 sebesar 66,60%. Hal ini dikarenakan Tidak semua tempat pelayanan KB melaporkan melalui Aplikasi Sistem

Informasi Keluarga (SIGA) terutama yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi mandiri.

Tren Peningkatan realisasi Rasio Akseptor KB



Maka, formulasi/perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah Peserta Aktif KB modern}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \right) \times 100$$

$$\left(\frac{203.743 \text{ orang}}{305.921 \text{ orang}} \right) \times 100 = 66,60\%$$

Rasio Akseptor KB bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Faktor keberhasilan tercapainya target Rasio Akseptor KB melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
4. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
5. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan

7. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu:

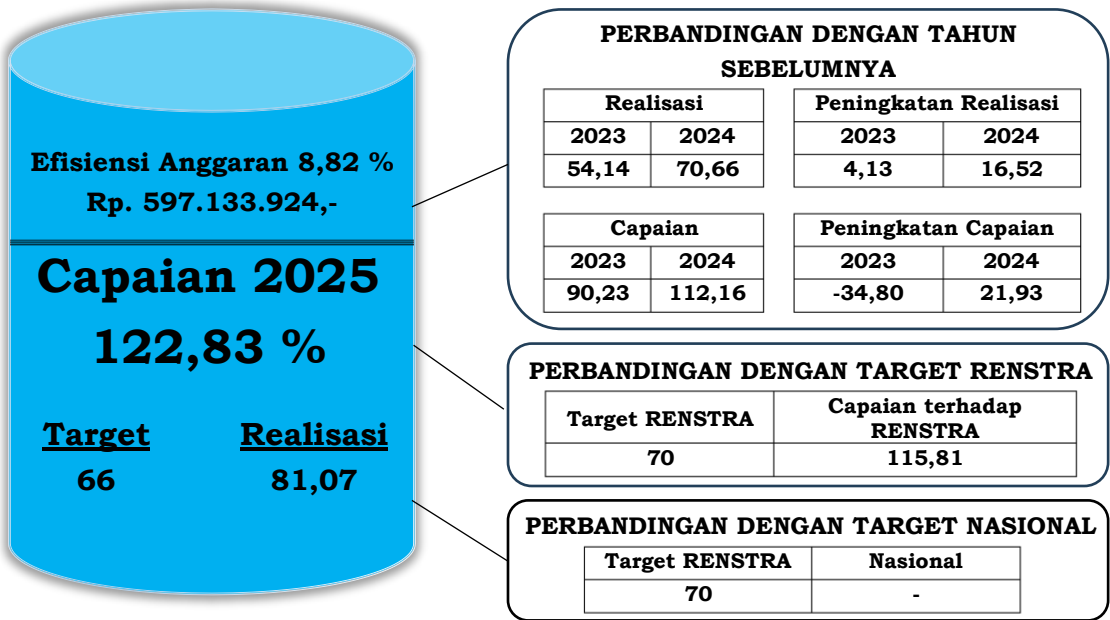
- 1. Program Pengendalian Pendudu;
- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 10,58% atau setara dengan Rp. 2.162.853.616,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.442.451.962,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.279.598.346,-.

7. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 terealisasi dengan nilai 81,07 poin dengan bobot nilai (A) Sangat Baik dari target nilai 66 poin. Upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan mengikuti rekomendasi penyempurnaan manajemen kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

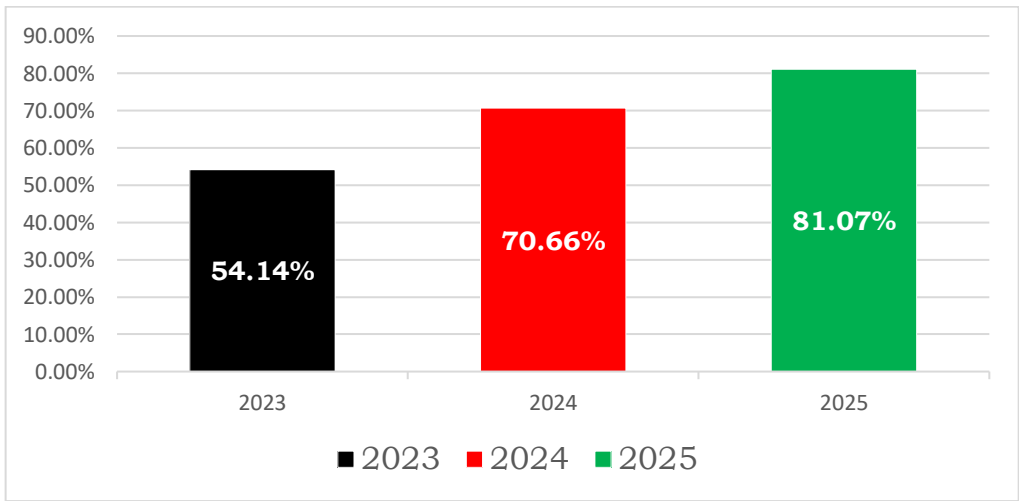


Pada Aspek Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,41 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 sebesar 70,66 Poin meningkat pada tahun 2025 sebesar 81,07 Poin. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan 10,67% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 112,16% menjadi 122,83% pada tahun 2025.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan yaitu Capaian 122,83% menunjukkan keberhasilan signifikan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja. Realisasi 81,07 melampaui target 66, mencerminkan perbaikan pada aspek manajemen kinerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program sosial secara keseluruhan.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2025 terealisasi sebesar 81,07 Poin dari target Renstra sebesar 70 Poin. Capaian tahun 2024 telah melampaui target sebesar 11,07 Poin. sehingga capaian realisasi Nilai Reformasi Birokrasi telah melampaui capaian Renstra yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami Peningkatan di tahun 2023 realisasi sebesar 54,14 Poin, tahun 2024 mencapai 70,66 Poin dan pada tahun 2025 sebesar 81,07 Poin.

Tren Peningkatan realisasi Nilai Reformasi Birokrasi



Faktor keberhasilan tercapainya target Nilai Reformasi Birokrasi melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 8,82 % atau setara dengan Rp. 597.133.924,- Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.769.143.579,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.172.009.655,-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
I	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	137,33	1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.074.383.628	6.922.460.200	151.923.428	97,85	2,15
					1. <i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.074.383.628	6.922.460.200	151.923.428	97,85	2,15
					1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	889.101.300	888.101.000	1.000.300	99,89	0,11
					2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	111.483.630	81.980.200	29.503.430	73,54	26,46
					3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.073.798.698	5.952.379.000	121.419.698	98,00	2,00
					4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-
II	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam	Persentase korban bencana alam dan sosial	100	2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1,735,858,600	1,681,996,200	53,862,400	96.90	3,10
					2. <i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	684,983,500	644,725,500	40,258,000	94.12	5,88

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
	dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota		3.	5.	Penyediaan Makanan	684,983,500	644,725,500	40,258,000	94.12	5,88
						<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	1,050,875,100	1,037,270,700	13,604,400	98.71	1,29
					6.	Koordinasi. Sosialisasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	426,875,100	413,270,700	13,604,400	96.81	3,19
					7.	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	624,000,000	624,000,000	-	100	0.00
III	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia	Persentase penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan	100	3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		2,821,015,680	2,723,863,295	97,152,385	96.56	3,44
					4.	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	2,821,015,680	2,723,863,295	97,152,385	96.56	3,44
					8.	Penyediaan Permakanan	1,493,935,880	1,411,995,300	81,940,580	94.52	5,48

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
	terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				9.	Penyediaan Sandang	607,861,500	600,938,395	6,923,105	98.86	1,14
						10.	Penyediaan Alat Bantu	719,218,300	710,929,600	8,288,700	98.85	1,15
IV	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	100	4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			708,000,000	649,481,000	52,000,000	91.73	8,27
					5.	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>		708,000,000	649,481,000	52,000,000	91.73	8,27
						11.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
						12.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	468,000,000	416,000,000	52,000,000	88.89	11.11

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
						13 .	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240,000,000	233,481,000	6,519,000	97.28	2.72
V	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	94,49	5.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			486,266,700	325,056,500	161,210,200	66.85	33.15
					6.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		107,635,700	106,425,500	1,210,200	98.88	1.12
						14 .	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	107,635,700	106,425,500	1,210,200	98.88	1.12
					7.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		18,631,000	18,631,000	-	100	0
						15 .	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	18,631,000	18,631,000	-	100	0

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
							Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi					
					8.		<i>Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	360,000,000	200,000,000	160,000,000	55.56	44.4 4
					16 .		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	360,000,000	200,000,000	160,000,000	55.56	44.4 4
				6.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			531,637,800	505,200,597	26,437,203	95.03	4,97
					9.		<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	531,637,800	505,200,597	26,437,203	95.03	4,97
					17 .		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	531,637,800	505,200,597	26,437,203	95.03	4,97

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
							Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
				7.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			449,869,500	445,619,500	4,250,000	99.06	0,94
				10	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			46,732,500	46,712,500	20,000	99.96	0,04
				18	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota			46,732,500	46,712,500	20,000	99.96	0,04
				11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			133,137,000	128,907,000	4,230,000	96.82	3,18

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
					19 .	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		133,137,000	128,907,000	4,230,000	96.82	3,18
					12 .	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		270,000,000	270,000,000	-	100	0.00
					20 .	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		270,000,000	270,000,000	-	100	0.00
				8.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			894,395,900	879,231,461	15,164,439	98.30	1,70
					13 .	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia</i>		360,903,400	349,495,429	11,407,971	96.84	3,16

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
						Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
						21 . Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	71,647,900	69,647,700	2,000,200	97.21	2,79
						22 . Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	289,255,500	279,847,729	9,407,771	96.75	3,25
					14 . Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		533,492,500	529,736,032	3,756,468	99.30	0,70
						23 . Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	240,000,000	240,000,000	-	100.00	0.00

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
							Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
						24.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	293,492,500	289,736,032	3,756,468	98.72	1,28
VI	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	92,18	9.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		205,736,000	201,421,000	4,315,000	97.90	2,10	
					15.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		205,736,000	201,421,000	4,315,000	97.90	2,10
						25.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		205,736,000	201,421,000	4,315,000	97.90
				10.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		10,148,584,900	8,016,337,159	2,132,247,741	78.99	21,01	
					16.	Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian		2,165,290,900	2,100,439,159	64,851,741	97.00	3,00

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
						Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
					26	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	880,000,000	855,828,076	24,171,924	97.25	2,75
					27	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	780,000,000	780,000,000	-	100	0,00
					28	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125,000,000	112,817,570	12,182,430	90.25	9,75
					29	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	380,290,900	351,793,513	28,497,387	92.51	7,49

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaia n Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi	
					17 .	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2,495,490,000	2,495,210,000	280.000	99,99	0,01	
						30 .	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2,495,490,000	2,495,210,000	280.000	99,99	0,01
					18 .	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota		1,608,504,000	1,576,438,000	32,066,000	98.01	1,99
						31 .	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38,700,000	22,360,000	16,340,000	57.78	42.2 2
						32 .	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,537,874,000	1,525,888,000	11,986,000	99.22	0,78
						33 .	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan	31,930,000	28,190,000	3,740,000	88.29	11,7 1

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
							Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
					19		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3,879,300,000	1,844,250,000	2,035,050,000	47.54	52,46
					34		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	3,879,300,000	1,844,250,000	2,035,050,000	47.54	52,46
				11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			10,088,131,062	10,061,840,187	26,290,875	99.74	0.26
				20	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			10,088,131,062	10,061,840,187	26,290,875	99.74	0.26

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
						35	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	393,000,000	392,306,967	693,033	99.82	0,18
						36	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	198,331,062	186,278,220	12,052,842	93.92	6,08
						37	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha	9.066.000.000	9,483,255,000	13,545,000	99,86	0,14

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
							Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
VI I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	112.16	12 .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			6,769,143,579	6,172,009,655	597,133,924	91.18	8,82
					23 .	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80,007,500	79,647,500	360,000	99.55	0,45
					37 .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		45,557,000	45,232,000	325,000	99.29	0.71
					38 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16,481,500	16,446,500	35,000	99.79	0.21
					39 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17,969,000	17,969,000	-	100.00	0.00

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
					24 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,514,924,639	4,929,311,380	585,613,259	89.38	10.6 2
					40 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,514,924,639	4,929,311,380	585,613,259	89.38	10.6 2
					25 .	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354,401,590	349,164,383	5,237,207	98.52	1.48
					41 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,187,090	115,749,630	4,437,460	96.31	3.69
					42 .	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	71,390,000	71,080,000	310,000	99.57	0.43
					43 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23,980,000	23,615,000	365,000	98.48	1.52
					44 .	Penyediaan Bahan/Material	44,844,500	44,844,500	-	100.00	0.00
					45 .	Fasilitasi Kunjungan Tamuk	28,000,000	27,985,000	15,000	99.95	0.05
					46 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,000,000	65,890,253	109,747	99.83	0.17
					26 .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523,329,850	518,605,446	4,724,404	99.10	0.90

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaia n Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisi ensi
						47 .	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	199,569,850	197,505,446	2,064,404	98.97	1.03
						48 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	323,760,000	321,100,000	2,660,000	99.18	0.82
					27 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		296,480,000	295,280,946	1,199,054	99.60	0.40
						49 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201,500,000	201,370,046	129,954	99.94	0.06
						50 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,980,000	43,922,000	1,058,000	97.65	2.35
						51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	49,988,900	11,100	99.98	0.02
JUMLAH								42,020,418,649	38,691,900,954	3,328,517,695	92.08	7,92

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 7 sasaran, terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 7.92% atau senilai Rp. 3.328.517.695.- yang rinciannya sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin” tercapai melalui indikator “Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial” sebesar 137.33% dan efisiensi anggaran sebesar 2.15%;
2. Kinerja Sasaran “Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah” tercapai melalui indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 3.10%;
3. Kinerja Sasaran “Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti” tercapai melalui indikator “Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 3.32%;
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS” tercapai melalui indikator “Persentase PPKS yang tertangani” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 8.27%;
5. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak” tercapai melalui indikator “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” sebesar 94.49% dan efisiensi anggaran sebesar 8.77%;
6. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepesertaan KB” tercapai melalui indikator “Rasio Akseptor KB” sebesar 92.18% dan efisiensi anggaran sebesar 10.58%;
7. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” tercapai melalui indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” sebesar 122.83% dan efisiensi anggaran sebesar 8.82%.

Besaran anggaran per program dan realisasi anggarannya sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Penunjang;

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.769.143.579	6.172.009.655	91.18

2. Urusan Sosial;

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	708.000.000	649.481.000	91.73
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.928.410.980	2.831.247.495	96.68
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.074.383.628	6.922.460.200	97.85
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.735.858.600	1.681.996.200	96.90

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	486.266.700	325.056.500	66.85
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	531.637.800	505.200.597	95.03
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	449.869.500	445.619.500	99.06
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	894.395.900	879.231.461	98.30

4. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	205.736.000	201.421.000	97.90
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.148.584.900	8.016.337.159	78.99
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	10.088.131.062	10.061.840.187	99.74

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) urusan. yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk keluarga berencana. dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan. terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran urusan bidang sosial. 1 (satu) indikator sasaran urusan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana. 1 (satu) indikator sasaran urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. serta 1 (satu) indikator sasaran urusan penunjang;
3. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya. sebagian telah dapat menyamai capaian kinerja tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 42.86%. yang melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 28.57%. yang mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 28.57%;
4. Jumlah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran sebanyak 12 (dua belas) program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 53 Sub Kegiatan;

4.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang sosial. pengendalian penduduk keluarga berencana. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial;
2. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

4. Belum optimalnya penyelenggaraan program Bangga Kencana (*Pembangunan Keluarga. Kependudukan dan Keluarga Berencana*).

Strategi pemecahan masalah yang diupayakan oleh Dinas Sosial. PPKB. P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- 1) Mengoptimalkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 3) Mengupayakan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan program Bangga Kencana (*Pembangunan Keluarga. Kependudukan dan Keluarga Berencana*).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial. PPKB. P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama periode tahun pelaporan.

Singaparna. Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL. PPKB P3A
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI. M.Si.

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19680507 199403 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SUGIANTO**
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

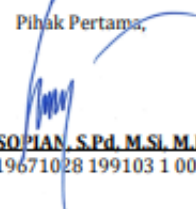
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,


ADE SUGIANTO

Pihak Pertama,


OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	67,40 %	~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %	~ PROGRAM PENANGANAN BENCANA
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	~ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,25 %	~ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,37 Poin	~ PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ~ PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ~ PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) ~ PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	72,25 %	~ PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ~ PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

				- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	66 Poin	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.959.394.639	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	668.000.000	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.320.000.000	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.226.000.000	APBD
5	Program Penanganan Bencana	1.804.000.000	APBD
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	595.000.000	APBD
7	Program Perlindungan Perempuan	546.510.000	APBD dan APBN
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	810.000.000	APBD
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	800.000.000	APBD
10	Program Pengendalian Penduduk	205.736.000	APBN
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.304.404.000	APBD dan APBN
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.974.800.000	APBD dan APBN
	Jumlah	41.213.844.639	

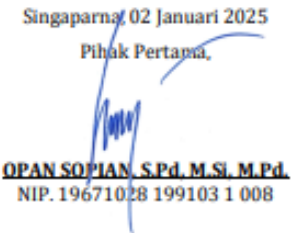
Pihak Kedua,



ADE SUGIANTO

Singaparna, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,



OPAN SOPHAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.

NIP. 19671028 199103 1 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP**
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua,

H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP

Pihak Pertama,

OPAN SOPIAN, S.Pd, M.Si, M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PPKB PPPA KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	81,65 %	- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.	Terpenahinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %	- PROGRAM PENANGANAN BENCANA
3.	Terpenahinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,25 %	- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,37 Poin	- PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	69,65 %	- PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

				- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	71,50 Poin	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.769.143.579	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	708.000.000	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.928.410.980	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.074.383.628	APBD
5	Program Penanganan Bencana	1.735.858.600	APBD
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	486.266.700	APBD
7	Program Perlindungan Perempuan	531.637.800	APBD dan APBN
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	449.869.500	APBD
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	894.395.900	APBD
10	Program Pengendalian Penduduk	205.736.000	APBN
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.148.504.900	APBD dan APBN
12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	10.008.131.062	APBD dan APBN
	Jumlah	42.020.418.649	

Singaparna, 28 Oktober 2025

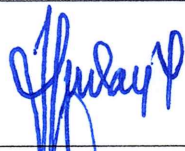
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. CECP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP


OPAN SOPIAN, S.Pd., M.Si., M.Pd.
NIP. 19671028 199103 1 008

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TIM PENYUSUN LKIP
TAHUN 2025 DINAS SOSIAL. PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. WINI. M.Si.	Penanggung jawab	
2.	dr. H. IMAN FIRMANSYAH. MM.Kes.	Ketua	
3.	HIFZHAN HAFIYYAN HAN HAN S.E	Sekretaris	
4.	MOHAMAD RIFAI. S.Sos	Anggota	
5.	EKA CITRA PURNAMA. ST	Anggota	
6.	MOHAMMAD ABDUL AZIS	Anggota	